

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi telah menyebabkan perubahan-perubahan yang cukup penting dalam peta kehidupan bernegara. Perubahan yang terjadi meliputi segala aspek kemasyarakatan dan tata laksana pemerintah baik di Pusat maupun di daerah. Paradigma baru mulai bergulir, dimana aspek kebebasan menjadi sorotan paling utama. Semua hal yang timbul dikaitkan dengan masalah Demokrasi, pembelaan hak asasi manusia serta transisi dari masa orde baru.

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi yang ditunjang dengan regulasi tentang keterbukaan informasi publik, dengan Keterbukaan informasi publik tersebut mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan meningkat pesat. Dengan Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 april 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Solok. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri no. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diantaranya adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) melalui surat Keputusan Kepala Daerah.

Inpres Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* tersebut mengamanatkan bahwa : (1) Bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan (2) Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan koordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Pada tahun 2018 Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman

untuk pelaksanaan SPBE dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Solok untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan, otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap Pemerintah Daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah Pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi di samaratakan secara nasional.

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dan untuk upaya dalam mencapai keberhasilan yang diinginkannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Upaya yang dilakukan dalam mencapai visi tersebut dilakukan adalah melalui perencanaan strategis, yang merupakan serangkaian rencana tindakan dalam bentuk program dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Solok ini merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok menyusun dan menetapkan Renstra Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Visi Pemerintah Kabupaten Solok :

*“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju
Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara’, Syara’
Basandi Kitabullah”*

Diperkuat dengan misi ke 5: Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*), khususnya pilar ke empat; penyelenggaraan pemerintahan yang bersih melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Renstra Diskominfo

ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) untuk periode pemerintahan sampai dengan tahun 2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam menyusun renstra adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pelaksananya.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2016 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Solok.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika
13. Peraturan Bupati Solok Nomor 60 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang telah di ubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 52 tahun 2018.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yaitu:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai
3. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah menetapkan Dokumen Perencanaan yang akan menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Diskominfo

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Diskominfo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Solok
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Diskominfo.
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo.

4.3 Strategi dan Kebijakan Diskominfo Kabupaten Solok tahun 2016-2021.

- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- BAB VII : PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1 Kedudukan

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2 Tugas Pokok

Tugas dan pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

2.1.3 Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi Diskominfo; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Struktur SKPD

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

Kepala Dinas

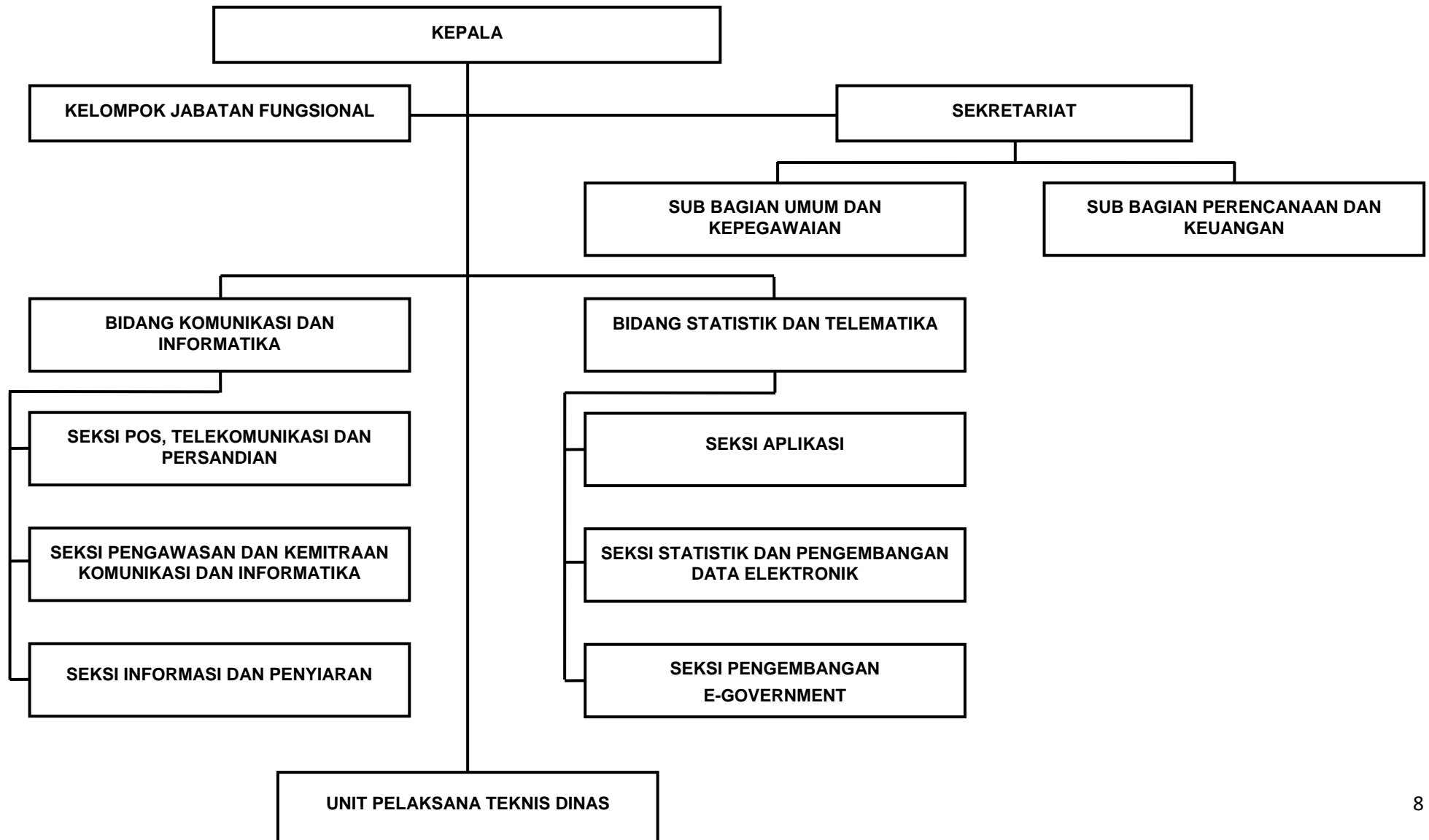
- a. Sekretaris, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Komunikasi dan Informatika :
 - 1) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

- 2) Seksi Pengawasan dan Kemitraan Komunikasi dan Informatika
- 3) Seksi Informasi dan Penyiaran
- c. Bidang Statistik dan Telematika :
 - 1) Seksi Aplikasi
 - 2) Seksi Statistik dan Pengembangan Data Elektronik
 - 3) Seksi Pengembangan e-Government
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 45 Tahun 2016 dapat digambarkan pada halaman berikut:



SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Solok dalam diuraikan sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat memiliki fungsi :

- a. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
- b. Penyelenggaraan Administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsinya, sekretariat dibantu oleh dua sub bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan uraian tugas :
 - a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada renstra;
 - d) Mengusulkan pejabat pengelola keuangan;
 - e) Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
 - f) Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
 - g) Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan keprotokoleran;
 - h) Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - i) Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun Daftar Urut Kepegawaian (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu Taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) struktural dan

- fungsional;
- j) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - k) Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment);
 - l) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - m) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; dan
 - n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan uraian tugas :
- a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyiapkan data statistik;
 - e) Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyingkronkan perencanaan kesatuan kerja;
 - f) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - g) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - h) Menyiapkan laporan keuangan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - j) Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan Informatika memiliki fungsi :

- 1) Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis bidang informasi, penyiaran, pengawasan dan kemitraan komunikasi dan informatika serta telekomunikasi, pos dan persandian;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan bidang informasi, penyiaran, pengawasan dan kemitraan komunikasi dan informatika serta telekomunikasi, pos dan persandian;
- 3) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;

- 4) Pemrosesan teknis perizinan/ rekomendasi sesuai dengan bidangnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Komunikasi dan Informatika dibantu oleh tiga seksi, antara lain :

- 1) **Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian** yang mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyiapkan bahan rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wire line cakupan area kota;
 - e) Menyiapkan bahan pemberian izin dan penertiban jasa penitipan untuk kantor agen, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah, badan hukum dan cakupan area kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 - f) Menyiapkan bahan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
 - g) Menyiapkan bahan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator dan instalator kabel/gedung;
 - h) Menyiapkan bahan pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
 - i) Menyiapkan bahan rekomendasi/pertimbangan teknis izin menara telekomunikasi dan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 - j) Mengirim, menerima dan menyampaikan berita sandi dan berita lainnya;
 - k) Mengembangkan dan memelihara alat-alat sandi dan telekomunikasi;
 - l) Menyelenggarakan sistem dan pengadaan peralatan sandi;
 - m) Menyelenggarakan hubungan telekomunikasi, persandian antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) **Seksi Pengawasan dan Kemitraan Komunikasi dan Informatika** dengan uraian tugas :

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
 - e) Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
 - f) Mengawasi menara telekomunikasi dan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 - g) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - h) Mendata, mengendalikan dan mengawasi usaha masyarakat bidang komunikasi dan informatika;
 - i) Menyiapkan bahan dan data pelaksanaan kerja sama, penyelenggaraan kegiatan operasional komunikasi dan informatika dan peningkatan sumber daya manusia;
 - j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 3) **Seksi Informasi dan Penyiaran** memiliki tugas :
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan informasi dan penyiaran;
 - e) Mengkoordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dan informasi dan penyiaran;
 - f) Melaksanakan administrasi pelayanan informasi pelayanan publik melalui website pemerintah, radio pemerintah dan media cetak pemerintah;
 - g) Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi, desiminasi informasi dan pengaduan

masyarakat;

- h) Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelenggaraan penyiaran elektronik;
- i) Mengadakan dan memelihara perangkat pelayanan informasi publik;
- j) Memproses teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
- k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Statistik dan Telematika

Bidang Statistik dan Telematika memiliki fungsi :

- 1) Perumusan rencana kerja bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik, dan kajian pengembangan aplikasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik dan pengembangan aplikasi;
- 3) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan pembinaan tugas bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik dan pengembangan aplikasi; dan
- 4) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang telematika e-government, pengembangan data elektronik dan pengembangan aplikasi.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Statistik dan Telematika dibantu oleh tiga seksi yaitu :

- 1) **Seksi Aplikasi**, mempunyai tugas :
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sesuai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Mengembangkan sistem informasi yang efektif dan representatif;
 - e) Melaksanakan dan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
 - f) Mengadakan. Menata dan merawat infrastruktur teknologi informasi dan atau sistem informasi;
 - g) Menyediakan jaringan internet pemerintah;
 - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2) **Seksi Statistik dan Data Elektronik**, mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d) Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak dan konten multi media;
- e) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bidang pengolahan data elektronik;
- f) Melaksanakan program dan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, transaksi elektronik, perangkat lunak dan konten multimedia;
- g) Membuat data secara elektronik;
- h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

3) **Seksi Pengembangan e-Government** mempunyai tugas :

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
- d) Menghimpun bahan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkoneksi e-Government, layanan pemerintahan dan layanan publik;
- e) Melaksanakan kerjasama program e-Government antar lembaga pemerintah;
- f) Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana telematika dalam mendukung implementasi e-Government;
- g) Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata kelola,

teknologi dan infrastruktur, interoperabilitas dan interkoneksi, aplikasi layanan pemerintahan, aplikasi layanan publik e-Government;

- h) Memberikan bimbingan dan pengendalian sistem informasi dan telematika kepada perangkat pemerintah;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2.1.5 Jumlah Personil

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan SKPD, sebagai SKPD yang baru disahkan, sampai tertanggal 01 Maret 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki personil dengan jumlah 17 orang PNS, 9 orang CPNS dan ditambah dengan 13 orang Tenaga Harian Lepas.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada table 2.1 :

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf		Jumlah
						PNS	Non PNS	
1	Kepala Dinas Kominfo	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	1	2	0	5	6	14
3	Bidang Statistik dan Telematika	0	1	3	5	0	3	12
4	Bidang Komunikasi dan Informatika	0	1	3	4	0	4	12
Jumlah								39

Berdasarkan tabel 2.1 didapat rincian golongan yang terdiri dari :

- a. Eselon II sebanyak 1 orang
- b. Eselon III.a sebanyak 1 orang
- c. Eselon III.b sebanyak 2 orang
- d. Eselon IV.a sebanyak 8 orang
- e. Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 9 orang
- f. Jabatan Fungsional Umum sebanyak 5 orang
- g. Staff Non PNS sebanyak 13 orang

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
I	PNS			
1	S2		7	27
		Manajemen	3	
		Chief Information Officer	3	
		Ilmu Komunikasi	1	
2	S1		16	62
		Komputer	5	
		Hukum	2	
		Ekonomi	1	
		Sosial	2	
		Pertanian	1	
		Matematika	4	
		Pendidikan	1	
3	SLTA		3	11
		SMU	3	
JUMLAH			26	100
II	Non PNS			
1	S1		4	31
		Komputer	2	
		Ekonomi	1	
		Hukum	1	
2	Diploma		4	31
		Komputer	2	
		Administrasi	2	
3	SLTA		4	31
		SMU	4	



4	SD		1	7
		SD	1	
JUMLAH			13	100

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup;

- 1. Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2. Penunjang berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan informatika (Bangunan Kantor, komputer, kendaraan bermotor roda empat)

Adapun rincian sarana kerja, dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Merk	Jml
Alat Angkut Kendaraan			
1	Mini Bus (Penumpang dibawah 14 orang)	Daihatsu	1
2	Sepeda Motor	Suzuki	1
3	Mini Bus (Penumpang dibawah 14 orang)	Toyota	1
Total			3
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga			
1	Filling Besi/Metal	Pesanan	1
2	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	TA Royal	1
3	Mesin Absensi	Solution X 601	33
4	Aset Lainnya	-	3
5	Genset	Asahi CO JP/AJP800E	4
6	Lemari Kayu	Pesanan / 2 Pintu	5
7	Lemari Kayu	Formoni	2
8	Meja Rapat	Pesanan	1
9	Alat Komunikasi Radio UHF Lain-lain	Pesanan	1
10	Kursi Rapat	Futura	7
11	Meja Kayu/Rotan	Futura	23
12	Meja Biro	Futura	1
13	Meja Biro	Sifo	1
14	Kursi Tamu	Valesia	1
15	Kursi Putar	Bigstar	7
16	AC Unit	Bigstar	2

17	Amplifier	Bigstar	1
18	Meja Komputer	Olympic	1
19	Meja Kayu/Rotan	-	12
20	Server	-	11
21	Meja Biro	Buatan	2
22	Meja Reseption	Buatan	1
23	Kursi Kerja	Savello	1
24	Mixer PVC	Pesanan	1
25	Headphone	Buatan	1
26	Headphone	LG	1
27	Headphone	Samsung	1
28	Stand Microphone	Samsung	1
29	Amplifier	Compact PJP	1
30	Lambang Instansi	-	1
31	P.C Unit/ Komputer PC	Samsung / Syne Master 793SG	1
32	P.C Unit/ Komputer PC	Acer / P166 HQL	1
33	P.C Unit/ Komputer PC	HP / X 20 LED	1
34	P.C Unit/ Komputer PC	Compag presario / CQ 3000	1
35	P.C Unit/ Komputer PC	Asus	1
36	P.C Unit/ Komputer PC	ACER Aspire TC708	1
37	P.C Unit/ Komputer PC	ACER Aspire TC709	1
38	Laptop	ACER ASPIRE / 4739	1
39	Laptop	Acer Aspire/Intel inside Core i5 / 4752 G	1
40	Laptop	Sony vaio / SVF 14212 SGW	1
41	Laptop	Assus/X4111N	8
42	Laptop	HP	1
43	Note Book	Samsung / NC 108	1
44	Note Book	sony	1
45	Printer	Hp	1
46	Printer	HP Laserjet P 1005	1
47	Printer	HP / LaserJet P 1102	2
48	Printer	Brother / MFC 5910	1
49	Printer	Epson / L 355	1
50	Printer	HP LaserJet / P1102	1
51	Printer	HP 315	1
52	Printer	Brother DPC-1700W	1
53	Printer	Laser Ject Pro/MFP 130 FN	2

54	UPS	ICA / CE 600	1
55	Server	Remound	1
56	Server	HP X1400 G2 Xeon E5503	2
57	Router	Network Connection	1
58	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	SONY	1
59	Filling Device	Frontline	1
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Expo	1
61	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	FANTONI / ALEGRO	1
62	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	HIDOLIE	1
63	Meja Kerja	Presanan	1
64	Meja Kerja	Activ	3
65	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Bigstar	1
66	Televisi	SHARP / Multi Systim	1
67	Amplifier	TOA	1
Total			178

Alat Studio dan Alat Komunikasi

1	Sound System	Amplifer	1
2	Camera + Attachment	Canon EOS 750D	1
3	Camera + Attachment	Canon EOS 1300 D	1
4	Proyektor + Attachment	Benq / sRGB	1
5	Facsimile	Panasonic / KX FT 983	1
6	Mixer PVC	Soundcraft	1
7	Headphone	Behringer	2
8	Headphone	Raschsehr	1
9	Stand Microphone	Dipole	1
10	Stand Microphone	perangkat studio	1
11	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	Flange	1
12	Unit Transceiver VHF Portable	Grounding	1
13	Unit Transceiver VHF Portable	LDF	2
14	Unit Transceiver VHF Portable	Jack Fhone	2
15	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	Exciters	1
16	Antena VHF/FM Portable	Canare	1
17	Jaringan Distribusi Lain-lain	driver	1
18	Mixer PVC	Mixing Audio	1
19	automatic Voltage Regulator (AVR)	Automatic Voltage	1

20	Microphone	Microphone Axis	4
21	Stand Microphone	Universal Metal	4
22	Handy Talky	motorola	1
Total			31
Total Keseluruhan			212

Sumber data : Rekapitulasi Inventaris Barang Dinas Komunikasi dan Informatika 31 Desember 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo

Indikator Kinerja pelayanan Diskominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Diskominfo Kabupaten Solok mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Diskominfo.

Pencapaian Kinerja pelayanan berdasarkan sasaran atau target Renstra periode sebelumnya (2011-2016) tidak dapat diukur karena Dinas Komunikasi dan Informatika baru dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika.

Sedangkan pada periode sebelumnya urusan Komunikasi dan Informatika tergabung pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dimana pada Dinas tersebut belum focus dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika karena Urusan saat itu masih merupakan **Urusan Pilihan**. Dalam artian Dinas tersebut lebih memprioritaskan pelaksanaan Urusan Perhubungan yang merupakan urusan wajib.

Namun untuk melihat pencapaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2016-2021 yang sedang berjalan, dapat dilihat pada table 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Target Capain Realisasi Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

No	Indikator Kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo		Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20
1	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	Persen-tase	50%	NA	NA	20%	30%	40%	50%	NA	NA	37%	-	-	-	NA	NA	1.85	-	-	-
		Persentase pengaduan masyarakat berbasis online yang terfasilitasi	Persen-tase	90%	NA	NA	90%	90%	90%	90%	NA	NA	100%				NA	NA	1.1			
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya Level SPBE	Level	3,4	NA	NA	1,8	2,4	2,9	3,4	NA	NA	2,02	-	-	-	NA	NA	1,1	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

2.4.1 Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :

- a. Keterbatasan kewenangan Kabupaten;
- b. Belum dilaksanakannya tatakelola layanan yang efektif;
- c. Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program;
- d. Masih rendahnya komitmen pengelola sumberdaya komunikasi dan informatika;
- e. Implementasi kewenangan belum terimplementasi secara optimal;
- f. Keterbatasan kapasitas sumber daya;
- g. Belum adanya standar baku pola arus data informasi antar instansi;
- h. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- i. Keterbatasan anggaran;
- j. Penyelenggaraan *e-government* belum menjadi prioritas jangka pendek bagi masing-masing SKPD;
- k. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki.
- l. Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Solok yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam pelayanan informasi yang terintegrasi;
- b. Banyaknya tututan dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Sumber daya manusia/aparatur yang ada belum maksimal dalam memahami Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

2.4.2 Peluang yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi adalah :

- a. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam penyelenggaraan/pengembangan *e-government* dan TIK;
- b. Bimtek dan pelatihan pengembangan TIK di tingkat Provinsi maupun Pusat rutin diadakan;
- c. Memadainya regulasi yang mendukung pengembangan TIK;
- d. Adanya fasilitas akses internet bagi daerah terpencil dari Kemkominfo;
- e. Meningkatnya minat dan pemamfaatan sarana TIK ditengah-tengah masyarakat;

Faktor pendorong keberhasilan

Yang akan menjadi pendorong keberhasilan Dinas Kominfo untuk menjawab tantangan dan peluang di atas diantaranya :

1. Adanya komitmen pimpinan terhadap pengembangan TIK.
2. Kemitraan yang harmonis dengan seluruh elemen maupun dengan

masyarakat untuk menjadikan Dinas Kominfo sebagai Pusat layanan informasi melalui teknologi informasi;

3. Komitmen SKPD dalam penyelenggaraan *e-government*.
4. Arah kebijakan pembangunan nasional yang menuntut pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, melalui :
 - Penyelenggaraan TIK secara menyeluruh untuk mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*).
 - Peningkatan infrastruktur telekomunikasi nasional dan daerah.
 - Peningkatan kualitas SDM penyelenggara TIK.
5. Minat dan kebutuhan masyarakat yang meningkat dalam pemanfaatan TIK.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur, sumber daya manusia dan anggaran baik yang berasal dari APBD, APBN maupun dari sumber anggaran lain yang tidak mengikat.

Realisasi anggaran pelayanan program/kegiatan Diskominfo berupa rasio dan rata-rata pertumbuhan Renstra Tahun 2011-2016 juga tidak dapat diuraikan karena Diskominfo baru dibentuk pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika. Sedangkan pada periode sebelumnya urusan Komunikasi dan Informatika tergabung pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dimana penganggaran pada Dinas tersebut belum focus dalam melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika karena Urusan saat itu masih merupakan **Urusan Pilihan**. Dalam artian Dinas tersebut lebih memprioritaskan penganggaran pada Urusan Wajib yaitu Urusan Perhubungan.

Namun untuk melihat Realisasi anggaran pelayanan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Renstra Periode 2016-2021 yang sedang berjalan dapat dilihat pada table 2.5 berikut.

TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DISKOMINFO KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2016 - 2021

No	Program / Kegiatan		Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun						Rata-rata Pertumbuhan			
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
I	Program Pengembangan Komunikasi Internal dan Media Massa																						
1																							
	1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan Daerah		374,450,000	-	-	-	-		370,933,200	-	-	-	-		-	1.0	-	-	-	374,450,000	370,933,200	
	2	Pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik		-	25,000,000	50,000,000	150,000,000	150,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	375,000,000	370,933,200	
	3	Penyusunan Data Base Pengembangan Pembangunan		53,050,000	-	-	-	-		52,729,000	0	0	-	-	0	-	1.0	-	-	-	53,050,000	52,729,000	
	4	Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal		-	45,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	345,000,000	52,729,000	
	5	Pembuatan konten lokal		-	15,900,000	25,000,000	200,000,000	200,000,000		-	-	25,000,000	-	-		-	-	1.000	-	-	440,900,000	25,000,000	
	6	Pengelolaan hubungan dengan media (media relations)		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	12,500,000,000	25,000,000	
	7	Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda		45,000,000	400,000,000	175,000,000	200,000,000	250,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,070,000,000	0	
	8	Pemantauan Tema Komunikasi Lintas Sektorat Lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah		-	15,900,000	35,000,000	200,000,000	200,000,000		-	15,900,000	-	-	-		-	1.000	-	-	-	450,900,000	15,900,000	
	9	Analisis Pengelolaan Data Penyediaan Informasi untuk Mendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral		-	16,000,000	35,000,000	150,000,000	200,000,000		-	16,000,000	-	-	-		-	1.000	-	-	-	401,000,000	31,900,000	
	10	Pengelolaan Saluran Komunikasi Milik Pemda/Media Internal Sektoral		470,750,000	196,750,000	87,000,000	300,000,000	300,000,000		-	113,310,000	87,000,000	-	-		-	0.576	1.000	-	-	1,354,500,000	216,310,000	
	11	Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	375,000,000	200,310,000	
	12	Pengelolaan informasi berklasifikasi		75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	375,000,000	-	
13	Penyediaan Pengembangan Media Informasi untuk Promosi Wisata		430,825,600	-	-	-	-	-		429,382,100	-	-	-	-		-	-	-	-	-	430,825,600	-	
II	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi																						
	1	14	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik		100,000,000	100,000,000	122,500,000	150,000,000	150,000,000		-				-	-	-	-	-	-	622,500,000	-	
III	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa																						
		15	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah		-	-	4,500,000	60,000,000	50,000,000		-	-	45,000,000	-	-		-		-	-	114,500,000	45,000,000	
		16	Monitoring dan analisa isu publik di media (media masa dan sosial)		15,000,000	45,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000		-	-	-	-	-		-		-	-	460,000,000	0	
		17	Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)		15,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-		-	-	315,000,000	0	

No	Program / Kegiatan		Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun							Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	18	Pengolahan pengaduan masyarakat		-	50,000,000	100,000,000	150,000,000	200,000,000		-	-	-	-	-		-			-	-	500,000,000	0
	19	Monitoring dan analisis citra pemda		-	45,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-			-	-	345,000,000	0
	20	Layanan Pengaduan Masyarakat		-	100,000,000	175,000,000	200,000,000	250,000,000		-	-	-	-	-		-			-	-	725,000,000	0
	21	Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (lbriefing notes, press release, backgrounders)		219,500,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		-	-	-	-	-		-			-	-	1,019,500,000	0
	22	Pelayanan informasi publik untuk implementasi UU KIP & PLID		75,000,000	190,069,800	270,000,000	280,000,000	300,000,000		-	175,904,800	-	-	-		-			-	-	1,115,069,800	175,904,800
	23	Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik.		-	30,000,000	200,000,000	200,000,000	25,000,000		-	26,000,000	-	-	-		-			-	-	455,000,000	26,000,000
	24	Layanan filtering konten negatif.		-	40,000,000	50,000,000	50,000,000	60,000,000		-	-	-	-	-		-			-	-	200,000,000	0
IV	Program Pengelolaan Infrastruktur Dasar dan Aplikasi e-Government																					
1	25	Layanan Pendaftaran nama domain dan sub domain OPD Lingkup Pemda Kab. Solok		-	60,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000		-	-	40,000,000	-	-		-			-	-	180,000,000	40,000,000
	26	Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Domain Portal dan website		180,000,000	180,000,000	-	50,000,000	-		-	-	-	-	-		-			-	-	410,000,000	0
	27	Layanan Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)		-	131,000,000	439,500,000	612,000,000	340,000,000		-	431,000,000	439,500,000	-	-		-	3.290		-	-	1,522,500,000	870,500,000
	28	Layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah		85,000,000	320,000,000	1,388,069,150	1,400,000,000	1,400,000,000		-	116,500,000	1,389,069,150	-	-		-	0.364		-	-	4,593,069,150	1,505,569,150
	29	Fasilitasi Pengelolaan Domain /subdomain, portal dan website Lembaga Pemreintah di kab. Solok		110,000,000	112,000,000	65,000,000	120,000,000	125,000,000		-	112,000,000	65,000,000	-	-		-	1.000		-	-	532,000,000	177,000,000
	30	Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika		-	240,000,000	240,000,000	240,000,000	240,000,000		-		-	-	-		-	-		-	-	960,000,000	0
	31	Government Cloud Computing		-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000		-		-	-	-		-	-		-	-	480,000,000	0

No		Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	32	Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah		-	413,900,000	415,000,000	415,000,000	420,000,000		-	385,368,000	-	-	-		-	0.931		-	-	1,663,900,000	385,368,000
	33	Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik (Spot Wifi)		236,000,000	3,016,000,000	1,940,000,000	1,954,400,000	1,870,240,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	9,016,640,000	0
	34	Layanan Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.		255,000,000	73,969,400	40,000,000	400,000,000	500,000,000		-	73,969,400	-	-	-		-	1.000		-	-	1,268,969,400	73,969,400
	35	Layanan interoperabilitas		-	300,000,000	300,000,000	330,000,000	330,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	1,260,000,000	0
	36	Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan		-	120,000,000	120,000,000	140,000,000	140,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	520,000,000	0
	37	Layanan Pusat Application Program Interface (API) Daerah		-	300,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	750,000,000	0
	38	Layanan monitoring trafik elektronik		-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	800,000,000	0
	39	Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah Kab. Solok		-	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	360,000,000	0
	40	Layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemda serta non pemerintah.		-	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	600,000,000	0
	41	Promosi pemanfaatan layanan smartcity		-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	1,200,000,000	0
V Program Government Chief Information Officer (GCIO) Pemkab. Solok																						
1	42	Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government Kabupaten Solok.		282,500,000	797,500,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-	-		-	-	1,380,000,000	0
	43	Perencanaan komunikasi publik dan citra positif		-	200,000,000	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-		-	-	200,000,000	0
VI Program Pengembangan Smartcity																						
1	44	Layanan Sistem Informasi Smart City		-	100,000,000	135,000,000	330,000,000	330,000,000		-	-	135,000,000	-	-		-	-	1.000	-	-	895,000,000	135,000,000
	45	Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat		-	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,200,000,000	0
	46	Layanan Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Smart City		-	300,000,000	545,000,000	300,000,000	300,000,000		-	-	545,000,000	-	-		-	-	1.000	-	-	1,445,000,000	545,000,000
	47	Layanan Pengembangan dan inovasi TIK dalam Implementasi e-Government		-	210,000,000	210,000,000	210,000,000	210,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	840,000,000	0
	48	Layanan Pemeliharaan Aplikasi Kepemerintahan dan Publik		-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	800,000,000	0
	49	Layanan Pengembangan Business Process ReEngineering Pelayanan di Lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah (Stakeholders Smart City)		-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	400,000,000	0
VII Program Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik Sektoral																						
1	50	Penetapan Standar Format Data dan Informasi, walidata dan kebijakan		-	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	240,000,000	0
	51	Standarisasi Pertukaran Informasi untuk Database Informasi Lintas Setoral		-	75,000,000	75,000,000	150,000,000	150,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	450,000,000	0
	52	Layanan Pengelolaan Data Elektronik Pemerintah dan Non Pemerintah		50,000,000	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	500,000,000	0

No		Program / Kegiatan	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun						Rata-rata Pertumbuhan		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	53	Layanan Recovery Data dan Informasi		-	50,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000		-	-	100,000,000	-	-		-	-	-	-	-	250,000,000	100,000,000
VIII																						
			Program Persandian dan Keamanan Informasi																			
1	54	Layanan Penanganan Insiden keamanan Informasi		-	100,000,000	96,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	96,000,000	-	-		-		1,000		-	396,000,000	96,000,000
	55	Layanan Persandian dan Keamanan Informasi pada Sistem elektronik		-	100,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000		-		50,000,000	-	-		-		1,000		-	350,000,000	50,000,000
	56	Pelaksanaan Audit TIK		-	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000		-	-	-	-	-		-		-	-	-	480,000,000	-
	57	Layanan Penyediaan sarana dan prasarana Telekomunikasi Pemerintah (Telphon, Iphon, Email, Videoconference)		-	900,000,000	600,000,000	200,000,000	200,000,000		-	-	-	-	-		-		-	-	-	1,900,000,000	-
	58	Pengadaan Penyimpanan, distribusi, Pengelolaan dan Pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian		-	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000		-	-	-	-	-		-		-	-	-	450,000,000	-
	59	Pelaksanaan Operasional Komunikasi Sandi		-	50,000,000	75,000,000	75,000,000	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	200,000,000	-
	60	Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian		-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000		-	-	-	-	-		-		-	-	-	200,000,000	-
IX																						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
1	61	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2,500,000	2,500,000	1,500,000	2,500,000	3,500,000		1,500,000	2,500,000	1,500,000	-	-		-	1,000	1,000			12,500,000	5,500,000
	62	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		15,000,000	16,500,000	25,000,000	19,965,000	21,961,500		27,792,600	32,500,000	25,000,000	-	-		-	1,970	1,000			98,426,500	85,292,600
	63	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		6,000,000	6,000,000	5,000,000	7,986,000	8,784,600		1,938,000	6,500,000	5,000,000	-	-		-	1,083	1,000			33,770,600	13,438,000
	64	Penyediaan makanan dan minuman		18,000,000	19,800,000	10,000,000	23,958,000	26,353,800		14,937,000	21,800,000	10,000,000	-	-		-	1,101	1,000			98,111,800	46,737,000
	65	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah		160,000,000	27,000,000	150,000,000	172,800,000	138,240,000		44,900,455	156,440,000	150,000,000	-	-		-	5,794	1,000			648,040,000	351,340,455
	66	Penyediaan Alat Tulis Kantor		25,000,000	27,500,000	30,250,000	33,275,000	36,602,500		21,562,000	38,562,000	30,000,000	-	-		-	1,402	0,992			152,627,500	90,124,000
	67	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan teknis perkantoran		-	60,000,000	70,000,000	70,000,000	80,000,000		-	56,000,000	-	-	-		-	0,933	0,000			280,000,000	56,000,000
	68	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		90,813,000	160,765,000	100,000,000	231,501,600	277,801,920		73,969,700	154,225,000	10,000,000	-	-		-	0,959	0,100			860,881,520	238,194,700
	69	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		33,600,000	33,600,000	16,860,000	40,656,000	44,721,600		13,981,136	13,829,000	16,860,000	-	-		-	0,412	1,000			169,437,600	44,670,136
	70	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		3,500,000	4,500,000	3,500,000	6,000,000	6,000,000		2,662,600	3,500,000	3,500,000	-	-		-	0,778	1,000			23,500,000	9,662,600
	71	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		1,800,000	1,800,000	1,800,000	2,000,000	2,000,000		2,897,500	1,800,000	1,800,000	-	-		-	1,000	1,000			9,400,000	6,497,500
	72	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		-	50,000,000	28,500,000	50,000,000	35,000,000		-	89,855,800	28,500,000	-	-		-	1,797	1,000			163,500,000	118,355,800
X																						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
1	73	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor		5,120,000	9,870,000	10,000,000	9,870,000	9,870,000		-	6,387,000	10,000,000	-	-		-	0,647	1,000			44,730,000	16,387,000
	74	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		-	9,870,000	9,870,000	9,870,000	9,870,000		-	58,061,000	-	-	-		-	5,883	0,000			39,480,000	58,061,000
	75	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional		85,000,000	500,000,000	50,000,000	50,000,000	-		-	-	-	-	-		-	-	0,000			685,000,000	0
	76	Pengadaan Meubleur		25,000,000	57,800,000	57,800,000	57,800,000	57,800,000		6850000	-	-	-	-		-	-	0,000			256,200,000	6,850,000
	77	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		-	64,400,000	21,500,000	15,000,000	15,000,000		2975000	-	21,500,000	-	-		-	-	1,000			115,900,000	24,475,000
	78	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas /operasional		151,750,000	197,275,000	100,000,000	264,076,000	340,891,200		86513737	162,802,200	100,000,000	-	-		-	0,825	1,000			1,053,992,200	349,315,937

No	Program / Kegiatan		Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran Pada tahun						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun						Rata-rata Pertumbuhan		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	
XI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																						
	1	79	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		143,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000	133,000,000		26670500	20,000,000	50,000,000	-	-		-	0.150	0.376			675,000,000	96,670,500
XII	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																						
	1	80	Pengadaan kartu pengenalan pegawai		1,500,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1,500,000	-
		81	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya		-	16,620,000	-	16,620,000	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	33,240,000	-
		82	pengadaan mesin/kartu absensi		45,000,000	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	45,000,000	-
		83	pengadaan pakaian hari-hari tertentu		-	7,500,000	-	7,500,000	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	15,000,000	-
XIII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																						
	1	84	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD		6,885,000	7,573,500	8,330,850	9,163,935	10,080,329		-	-	37,000,000	-	-		-	-	4.441	-	-	42,033,614	37,000,000
		85	Penyusunan laporan keuangan semesteran		6,885,000	7,573,500	8,330,850	9,163,935	10,080,329		-	-	500,000	-	-		-	-	0.060	-	-	42,033,614	500,000
		86	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		6,885,000	7,573,500	8,330,850	9,163,935	10,080,329		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	42,033,614	0
		87	Pembuatan/Pengembangan website		-	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000		-	-	15,000,000	-	-		-	-	1	-	-	45,000,000	15,000,000
		88	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		6,885,000	7,573,500	8,330,850	9,163,935	10,080,329		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	42,033,614	0
		89	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		6,885,000	7,573,500	8,330,850	9,163,935	10,080,329		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	42,033,614	0
		90	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pemerintah daerah		6,885,000	7,573,500	8,330,850	9,163,935	10,080,329		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	42,033,614	0
		91	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	1,300,000	1,300,000	1,400,000	1,400,000		11,584,800	1,300,000	1,000,000	-	-		-	1.000	0.769	-	-	5,400,000	13,884,800
					6,500,968,600	15,807,030,200	14,458,434,250	16,217,161,210	15,944,519,092		1,193,779,328	2,292,014,200	3,533,729,150	-	-		-	-	0.000	-	-	68,928,113,352	7,271,012,778

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berhubungan dengan isu – isu strategis Pemerintah Daerah, dapat dijelaskan kondisi dan gambaran umum Kabupaten Solok, yaitu :

- a. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (*e-government*) belum optimal;
- b. Pelayanan dan penyebaran informasi kepada masyarakat belum optimal.
- c. Masih kurangnya sarana/prasarana dan infrastruktur Komunikasi dan Informatika
- d. Masih belum meratanya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

3.2 Telaahan visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi (***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***) serta RPJMD Kabupaten Solok tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan sesuai dengan Misi 5: **Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat sebagai perwujudan Prioritas Pembangunan ke 10: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan** sasaran yang dicapai adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan salah satu Indikator Kinerja Utama : Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Maka kondisi yang ingin dicapai sebagai sasaran Dinas Kominfo 5 Tahun kedepan adalah :

- Meningkatnya Ketersediaan Informasi Publik berbasis TIK
- Terlaksananya pengaduan masyarakat berbasis online
- Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan Diskominfo.

2.5 Analisis Lingkungan Internal

- a. Kekuatan / Strength (S)
 - Kuantitas sumber daya aparatur cukup memadai.
 - Peningkatan kemampuan keuangan daerah.

- Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah.
- Perkembangan TIK yang pesat telah menyentuh kesemua lapisan masyarakat hingga birokrasi daerah.
- Memadainya perangkat perundang-undangan sebagai payung hukum implementasi TIK dan e-government.

b. Kelemahan / *Weakness (W)*

- Kemampuan *e-leadership* aparatur masih belum optimal.
- Daya dukung infrastruktur, sarana dan prasarana belum memadai.
- Kinerja pelayanan publik belum memuaskan.
- Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah.
- Aturan pendukung, SOP dan dokumen induk perencanaan (*master plan*) belum memadai.

2.6 Analisis Lingkungan Eksternal

a. **Peluang / opportunities (O)**

- Adanya kebutuhan terhadap informasi yang tinggi disetiap lapisan golongan masyarakat
- Kebutuhan dan animo terhadap TIK di tingkat penyelenggara pemerintah dan masyarakat semakin meningkat.
- Letak geografis Kabupaten Solok yang strategis; dilalui oleh akses jalan Trans Sumatera dan wilayah persimpangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain menuju pusat Provinsi maupun Provinsi Tetangga.
- Adanya pelimpahan urusan/kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Peningkatan daya saing Kabupaten Solok.
- Tersedianya teknologi yang memadai.

b. **Ancaman / Threats (T)**

- Tuntutan yang semakin kritis dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Solok yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam pelayanan informasi yang terintegrasi;
- Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.

Terhadap tantangan dan peluang Diskominfo Kabupaten Solok yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan kajian dan analisa aspek yang mempengaruhi

melalui metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*) yang di tampilkan pada tabel berikut ini:

3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan memperhatikan berbagai faktor – faktor kunci keberhasilan tersebut, maka dapat disampaikan beberapa isu-isu strategis dalam rangka peningkatan peranan pengawasan antara lain :

- a. Pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik (*e-government*) belum optimal;
- b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal;
- c. Belum optimalnya informasi yang tersedia terkait kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Belum tersedianya kebijakan yang terintegrasi antara masing-masing SKPD karena data dasar yang berbeda-beda;
- e. Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi;
- f. Belum memadainya pemahaman konsep komunikasi, informatika dan *e-government* dikalangan aparatur.

Berdasarkan gambaran tentang analisa lingkungan internal dan eksternal terhadap isu-isu strategis yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan dan birokrasi pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka perlu dikembangkan strategi sebagai berikut:

1. *Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)*
2. *Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)*
3. *Strategi Kekuatan dan Ancaman (S-T)*
4. *Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)*



Tabel 3.4 : Matrikulasi isu – isu Strategis berdasarkan analisa **SWOT**

	<u>Kekuatan / Strenght</u>	<u>Kelemahan/ weakness</u>
	<ol style="list-style-type: none">1. Kuantitas sumber daya aparatur cukup memadai.2. Peningkatan kemampuan keuangan daerah.3. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah.4. Perkembangan TIK yang pesat telah menyentuh kesemua lapisan masyarakat hingga birokrasi daerah.5. Memadainya perangkat perundang-undangan sebagai payung hukum implementasi TIK dan e-government.	<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan <i>e-leadership</i> aparatur masih belum optimal.2. Daya dukung infrastruktur, sarana dan prasarana belum memadai.3. Kinerja pelayanan publik belum memuaskan.4. Belum optimalnya kinerja manajemen pemerintah daerah.5. Aturan pendukung, SOP dan dokumen induk perencanaan (<i>master plan</i>) belum memadai.
<u>Peluang / Opportunities</u>	<u>Strategi (S – O)</u>	<u>Strategi (W – O)</u>
<ol style="list-style-type: none">1. Kebutuhan terhadap informasi yg tinggi disetiap golongan masyarakat.2. Kebutuhan dan animo terhadap TIK di tingkat penyelenggara pemerintah dan masyarakat semakin meningkat.3. Letak geografis Kab Solok yang strategis; dilalui oleh akses jalan Trans Sumatera dan wilayah persimpangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain menuju pusat Provinsi maupun Provinsi Tetangga.4. Pelimpahan urusan/	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan aparatur yang profesional, adaptif dan responsif dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang luas.2. Adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan <i>e-government dan TIK</i>.3. Optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung daya saing kabupaten Solok dalam rangka mewujudkan	<ol style="list-style-type: none">1. Reformasi manajemen publik, keuangan dan aset daerah dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang berbasis kinerja, ekonomis, efisien dan efektif.2. Peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, kewenangan dan penyusunan SOP,



<p>kewenangan yg luas kepada pemda yaitu dengan ditetapkan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>5. Peningkatan daya saing Kabupaten Solok.</p> <p>6. Tersedianya teknologi yang memadai.</p>	<p>Kabupaten Solok sebagai Kabupaten terbaik.</p> <p>4. Pendapatan daerah yang terus meningkat guna mendorong peningkatan pembangunan di semua lini.</p>	<p>penerapan standar pelayanan minimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan publik.</p>
<p>Ancaman / Threats</p> <p>1. Tuntutan yang semakin kritis dari masyarakat terhadap transparansi informasi yang mudah diakses terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</p> <p>2. Kondisi dan letak geografis pemerintah Kabupaten Solok yang begitu luas dengan struktur perbukitan akan menyulitkan dalam pelayanan informasi yang terintegrasi;</p> <p>3. Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan TIK.</p>	<p>Strategi (S – T)</p> <p>4) Menekan dampak kekurangan dan kelemahan penyelenggaraan birokrasi yang belum efisien, efektif dan terintegrasi;</p> <p>5) Pengembangan sistem edukasi yang dapat diterima secara sederhana, tepat sasaran dan aplikatif yang dapat diterima luas oleh masyarakat</p> <p>6) Mengembangkan sistem informasi yang transparan, mudah diakses dan akurat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Strategi (W – T)</p> <p>1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>2. Perbaikan manajemen layanan publik dalam pembangunan;</p>



3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tabel 3.5: Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupate Solok Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok	Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan jangkauan dan pelayanan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel di seluruh wilayah Kabupaten Solok	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1.Kebijakan nasional (UU,PP,Permen)dan perluasan jangkauan olehpenyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
2.	Peningkatan jangkauan dan pelayanan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan kegiatan industri meliputi: 1.Kec Gunung Talang; 2. Kec Lembah Gumanti; 3. Kecamatan Kubung.	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1.Kebijakan nasional (UU,PP,Permen)dan perluasan jangkauan olehpenyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung

				komunikasi dan informatika.
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan telekomunikasi kabel dengan mengutamakan jaringan bawah tanah pada daerah tertentu di seluruh wilayah Kabupaten Solok;	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1.Kebijakan nasional (UU,PP,Permen)dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
4.	Mempertahankan dan mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi selular di wilayah Kabupaten Solok;	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1.Kebijakan nasional (UU,PP,Permen)dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
5.	Peningkatan kerjasama antar sistem jaringan telekomunikasi selular/antar operator telepon seluler; dan	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1.Kebijakan nasional (UU,PP,Permen)dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan



				infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.
6.	Penggunaan fasilitas stasiun pemancar (<i>Base Transceiver Station</i>) terpadu dalam rangka efisiensi ruang	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal 3. Kewenangan yg terbatas sesuai UU no. 23 Tahun 2014	Sinkronisasi program belum terwujud	1.Kebijakan nasional (UU,PP,Permen)dan perluasan jangkauan oleh penyedia layanan 2. Terdapat peluang pada sector peningkatan dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung komunikasi dan informatika.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien .serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Solok yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”***.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada Misi 5: **Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dengan Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, profesional serta Pro rakyat sebagai perwujudan Prioritas Pembangunan ke 10: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan** sasaran yang dicapai adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan salah satu Indikator Kinerja Utama : Level Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan

Sejalan dengan Misi 5 " Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih" pada RPJMD 2016-2021, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan informasi publik
2. Meningkatnya pengaduan masyarakat berbasis online yang terfasilitasi
3. Meningkatnya Level SPBE

Pencapaian tujuan dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMINFO TAHUN 2016-2021

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syara',Syara' Basandi Kitabullah

Misi : **Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*)**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Target Akhir
							Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Keterbukaan Informasi	Meningkatnya ketersediaan informasi publik	Persentase jenis informasi publik yang tersedia	%		NA	NA	20%	30%	40%	50%	50%
			Meningkatnya pengaduan masyarakat berbasis online yang terfasilitasi	Persentase pengaduan masyarakat berbasis online yang terfasilitasi	%		NA	NA	90%	90%	90%	90%	90%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Level SPBE	Meningkatnya Level SPBE	Level SPBE	Level		NA	NA	1.8	2.4	2.9	3.4	3.4

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Informasi
3. Meningkatkan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) tentang informasi public
4. Meningkatkan Fasilitas Pemberdayaan StakeHolder Komunikasi Publik.
5. Meningkatkan Pengawasan Penyedia Layanan Informasi.
6. Meningkatkan Level Kebijakan SPBE
7. Meningkatkan Level Tata Kelola SPBE
8. Meningkatkan Level Layanan SPBE
9. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Data Statistik dan Elektronik
10. Meningkatkan Ketersediaan SDM Pengelola Data Statistik dan Elektronik
11. Meningkatkan ketersediaan NSPK Data Statistik dan Elektronik
12. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi
13. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi
14. Meningkatkan Ketersediaan NSPK Persandian dan Keamanan Informasi
15. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur
16. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi :

1. Pengembangan Media dan Konten Komunikasi Informasi Publik
2. Pengembangan kapasitas SDM Pengelola Informasi
3. Penyusunan/Penyediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) tentang informasi public
4. Pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan StakeHolder Komunikasi Publik.
5. Peningkatan Pengawasan Penyedia Layanan Informasi.
6. Penyusunan/Penyediaan NSPK SPBE
7. Melaksanakan NSPK SPBE secara berkelanjutan
8. Pengelolaan Infrastruktur SPBE
9. Pengembangan SDM Pengelola SPBE
10. Penyediaan dan Pengelolaan Aplikasi SPBE
11. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Data Statistik dan Elektronik

12. Pengembangan SDM Pengelola Data Statistik dan Elektronik
13. Penyusunan/Penyediaan NSPK Data Statistik dan Elektronik
14. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi
15. Pengembangan SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi
16. Penyusunan/Penyediaan NSPK Persandian dan Keamanan Informasi
17. Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur
18. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Visi :
(“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok Yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Yang Madani Dalam Nuansa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”)

Misi 5 : Memantapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan informasi publik 2. Meningkatnya pengaduan masyarakat berbasis online yang terfasilitasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi 2. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Informasi 3. Meningkatkan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) tentang informasi public 4. Meningkatkan Fasilitas Pemberdayaan StakeHolder Komunikasi Publik. 5. Meningkatkan Pengawasan Penyedia Layanan Informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Media dan Konten Komunikasi Informasi Publik 2. Pengembangan kapasitas SDM Pengelola Informasi 3. Penyusunan/Penyediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) tentang informasi public 4. Pelaksanaan Fasilitas Pemberdayaan StakeHolder Komunikasi Publik. 5. Peningkatan Pengawasan Penyedia Layanan Informasi.
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Level SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Level Kebijakan SPBE 2. Meningkatkan Level Tata Kelola SPBE 3. Meningkatkan Level Layanan SPBE 4. Meningkatkan Saranan dan Prasarana Penunjang Data Statistik dan Elektronik 5. Meningkatkan Ketersediaan SDM Pengelola Data Statistik dan Elektronik 6. Meningkatkan ketersediaan NSPK Data Statistik dan Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan/Penyediaan NSPK SPBE 2. Melaksanakan NSPK SPBE secara berkelanjutan 3. Pengelolaan Infrastruktur SPBE 4. Pengembangan SDM Pengelola SPBE 5. Penyediaan dan Pengelolaan Aplikasi SPBE 6. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Data Statistik dan Elektronik 7. Pengembangan SDM Pengelola Data Statistik dan Elektronik 8. Penyusunan/Penyediaan NSPK Data Statistik dan Elektronik 9. Pengembangan Sarana dan Prasarana

		<p>7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi</p> <p>8. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi</p> <p>9. Meningkatkan Ketersediaan NSPK Persandian dan Keamanan Informasi</p>	<p>Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi</p> <p>10. Pengembangan SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi</p> <p>11. Penyusunan/Penyediaan NSPK Persandian dan Keamanan Informasi</p>
--	--	---	--

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1.1 Program dan Kegiatan Pokok

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Solok telah merumuskan rencana 5 tahun (2016 – 2021) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas Kominfo Kabupaten Solok untuk mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan dengan didukung Teknologi Informasi dan komunikasi.

Guna menindaklanjuti agenda sebagaimana dimaksud dalam RPJMD disinilah peran tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.1.1 Program Prioritas

Rencana Program Kegiatan proiritas yang ditetapkan Dinas Kominfo untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
4. Program Pengelolaan Infrastruktur Dasar dan Aplikasi E-Government
5. Program Pengembangan Smart City
6. Program Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik Sektor
7. Program : Persandian dan keamanan informasi.

1.1.2 Program Penunjang

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.1.3 Kegiatan yang ada pada program prioritas

1 Prog. Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa

- a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan Daerah
- b. Pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik
- c. Penyusunan Data Base Pengembangan Pembangunan
- d. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal
- e. Pembuatan konten lokal

- f. Pengelolaan Hubungan dengan Media (Media relations)
 - g. Diseminasi Informasi Kebijakan Melalui Media Pemda dan Non Pemda
 - h. Pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemkab
 - i. Analisis data informasi komunikasi publik lintas sektoral
 - j. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/media internal
 - k. Penyelenggaraan Ibternet Sehat, Kreatif, Inovatif dan Produktif
 - l. Pengelolaan Informasi berklasifikasi
 - m. Penyediaan Pengembangan Media Informasi untuk Promosi Wisata
- 2 Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik
- 3 Prog. Kerjasama Informasi dan Media Massa**
- a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - b. Monitoring dan analisa isu publik di media (media masa dan sosial)
 - c. Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)
 - d. Pengolahan pengaduan masyarakat
 - e. Monitoring dan analisis citra pemda
 - f. Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (lbriefing notes, press release, backgrounders)
 - g. Pelayanan informasi publik untuk implementasi UU KIP & PLID
 - h. Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi komunikasi public
 - i. Layanan Filtering Konten negative
- 4 Program Pengelolaan Infrastruktur Dasar dan Aplikasi E-Government**
- a. Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain OPD lingkup Pemkab Solok
 - b. Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Domain, Portal dan Website
 - c. Layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center(DRC)
 - d. Layanan Akses Internet dan Internet Pemerintah
 - e. Fasilitas Pengelolaan Domain/Sub Domain, Portal Website Lembaga Pemerintah di Kabupaten Solok
 - f. Layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika
 - g. Government Cloud Computing
 - h. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
 - i. Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik (Spot Wifi)
 - j. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi

- k. Layanan interoperabilitas
- l. Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan
- m. Layanan Pusat Application Programm Interface (API) Daerah
- n. Layanan monitoring trafik elektronik
- o. Layanan Integrasi Pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten Solok
- p. Layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemda serta non pemerintah
- q. Layanan interkoneksi jaringan Intra Pemerintah
- r. Promosi pemanfaatan layanan smartcity

5 Pengembangan Smart City

- a. Layanan Sistem Informasi Smart City
- b. Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat
- c. Layanan Sarana dan Prasarana Pengendalian Smart City
- d. Layanan Pengembangan dan Inovasi TIK dan Implementasi e-Government
- e. Layanan Pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan Publik
- f. Layanan Pengembangan Bussines Proses ReEngineering Pelayanan di Lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah (StakeholderSmartcity)

6 Program Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik Sektoral

- a. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan
- b. Standarisasi Pertukaran Informasi untuk Data Base Informasi Lintyas sektoral
- c. Layanan pengelolaan data elektronik pemerintah dan non pemerintahan
- d. Layanan recovery data dan informasi

7 Program : Persandian dan keamanan informasi.

- a. Layanan penanganan insiden keamanan informasi
- b. Layanan persandian dan keamanan informasi pada sistem Elektronik Pemkab. Solok
- c. Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Pemerintah (Telepon, iPhone, Email, Video conference dll)
- d. Pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
- e. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif
- f. Pelaksanaan operasional komunikasi sandi
- g. . Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian

1.1.4 Kegiatan yang ada pada Program Penunjang

- 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- c. Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor
 - d. Penyediaan makanan dan minuman
 - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah
 - f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Penyesuaian Jasa Pendukung Administrasi Keamanan Teknis Perkantoran
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - i. penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - j. Penyediaan jasa kebersihan Kantor
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 Kegiatan :
- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Frontliner dsb)
 - c. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - d. Pengadaan Meubeleur
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas /operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 2 Kegiatan :
- a. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 Kegiatan :
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 Kegiatan :
- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - c. penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
 - d. penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Adapun Matrik Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tahun 2016-2021 yang memuat daftar rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif adalah pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir tahun periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1. Meningkatkan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Meningkatkan Ketersediaan Informasi Publik	1. Persentase Jenis Informasi Publik yang tersedia	1	25	15	DINAS KOMINFO			-	6,102,200,000	-	13,995,789,200	-	13,663,649,150	-	16,175,312,600	-	35,374,499,520					
						Prog. Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media massa	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Pemerintah Daerah		-	100.00%	4,014,700,000	100.00%	4,572,550,000	100.00%	4,367,000,000	100.00%	5,210,000,000	100.00%	5,387,000,000				
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyiaran Radio Solok Nan Indah yang berizin	0	0 % Izin Siar Radio	-	1 Sertifikat	395,750,000	1 Sertifikat	400,000,000	1 Sertifikat	400,000,000	1 Sertifikat	450,000,000	1 Sertifikat	500,000,000	1 Izin Siar Radio	DINAS KOMINFO	Koto Baru
						Pengklasifikasian dan Inventarisasi Informasi Publik	Ter-klasifikasikannya dan terinventarisasikannya Informasi Publik	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	25,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	175,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
						Penyusunan Data Base Pengembangan Pembangunan	Tersusunnya Data Base Pengembangan Pembangunan	0	0 % Lumbung Data	-	1 Lumbung Data	49,200,000	1 Lumbung Data	404,000,000	1 Lumbung Data	405,000,000	1 Lumbung Data	405,000,000	1 Lumbung Data	406,000,000	1 Lumbung Data	DINAS KOMINFO	
						Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal	Jumlah Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal	0	0% Konten	-	0% Konten	-	10 Konten	45,000,000	12 Konten	100,000,000	12 Konten	100,000,000	12 Konten	100,000,000	12 Konten	DINAS KOMINFO	
						Pembuatan konten lokal	Jumlah pembuatan konten lokal (film dokumenter Kab. Solok)	0	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	15,900,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	DINAS KOMINFO	
						Pengelolaan hubungan dengan media (media relations)	Terkelolanya hubungan dengan media (media relations).	0	0.00%	-	100.00%	2,500,000,000	100.00%	2,500,000,000	100.00%	2,500,000,000	100.00%	2,500,000,000	100.00%	2,500,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
						Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda	Terlaksananya Diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda dan terbentuknya KIKM	0	0 KIKM	-	1 KIKM	45,000,000	1 KIKM	400,000,000	1 KIKM	175,000,000	1 KIKM	200,000,000	1 KIKM	250,000,000	0 KIKM	DINAS KOMINFO	
						Pemantauan Tema Komunikasi Lintas Sektoral Lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah	Pemantauan Tema Komunikasi Lintas Sektoral Lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	15,900,000	100.00%	35,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
				Analisis Pengelolaan Data Penyediaan Informasi untuk Mendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral	Jumlah Data dan Informasi Komunikasi Publik Lintas Sektoral yang dianalisis dan Jumlah Data yang diolah serta informasi yang disediakan untuk mendukung Kounikasi Publik Lintas sektoral	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	16,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO			

					Pengelolaan Saluran Komunikasi Milik Pemda/Media Internal Sektoral	Ranperda Radio, Penyediaan alat Studio & amp. Komunikasi, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media ruang dan terselenggaranya LPPL Radio Solok Nan Indah	0	0 LPPL	-	1 LPPL	470,750,000	1 LPPL	196,750,000	1 LPPL	87,000,000	1 LPPL	300,000,000	1 LPPL	300,000,000	1 LPPL	DINAS KOMINFO	
					Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif	Terselenggaranya internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif.	0	0.00%	-	0.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pengelolaan informasi berklasifikasi	Terkelolanya informasi berklasifikasi	0	0.00%	-	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Penyediaan Pengembangan Media Informasi untuk Promosi Wisata	Tersedianya penyediaan Media Informasi (web) Portal OPD	0	0% Website seluruh OPD	-	1 Website seluruh OPD	404,000,000	1 Website seluruh OPD	404,000,000	1 Website seluruh OPD	405,000,000	1 Website seluruh OPD	405,000,000	1 Website seluruh OPD	406,000,000	1 Website seluruh OPD	DINAS KOMINFO	
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persenutase Pembangunan sistem Administrasi Elektronik per	-	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	1	122,500,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	-	-
					Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik	Terkelolanya Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik	0	0.00%	-	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	122,500,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
			1	25	18	Prog. Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Informasi dan Media Massa		-		324,500,000		750,069,800		1,270,000,000		1,405,000,000		1,610,000,000			
					Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah	0	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	4,500,000	100.00%	60,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Monitoring dan analisa isu publik di media (media masa dan sosial)	Jumlah isu publik yg tangani.	0	0.00%	-	100.00%	15,000,000	100.00%	45,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)	Jumlah laporan pendapat umum yg dikumpulkan.	0	0.00%	-	100.00%	15,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Monitoring dan analisis citra pemda	Persentase pendapat dan pemberitaan negatif-postif tentang Pemda	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	45,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (lbrieffing notes, press release, backgrounders)	Tersedianya bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (lbrieffing notes, press release, backgrounders)	0	0.00%	-	100.00%	219,500,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, serta berkembangnya KIKM.	Tersedianya akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, serta berkembangnya KIKM.	0	0 Kelompok KIKM	-	0 Kelompok KIKM	-	1 Kelompok KIKM	30,000,000	1 Kelompok KIKM	200,000,000	1 Kelompok KIKM	200,000,000	1 Kelompok KIKM	250,000,000	1 Kelompok KIKM	DINAS KOMINFO	
					Layanan filtering konten negatif.	Jumlah konten negatif yang difilter	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	40,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pengolahan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masy. Yg diolah	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	50,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	

						Pelayanan informasi publik untuk implementasi UU KIP & PLID	Terlayannya informasi publik dengan baik (PLID, Hari Hak untuk Tahu)	0	0 Tahun	-	1 Tahun	75,000,000	1 Tahun	190,069,800	1 Tahun	270,000,000	1 Tahun	280,000,000	1 Tahun	300,000,000	1 Tahun	DINAS KOMINFO		
			Persentase Pengaduan Masyarakat berbasis online yang terfasilitasi				Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yg terlayani & terlaksananya Sosialisasi & edukasi penyelesaian sengketa informasi.	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	100,000,000	100.00%	175,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	250,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Level SPBE	Level SPBE	1	25	19	Program Pengelolaan Infrastruktur Dasar dan Aplikasi E-Government	Optimalnya Struktur E-Government dan Pengelolaan TIK (Domain, Rancangbangun, Akses, Aplikasi, Internet)			-		866,000,000		6,126,869,400		5,998,569,150		8,571,400,000		25,106,240,000				
						Layanan Pendaftaran nama domain an sub domain OPD Lingkup Pemda Kab. Solok	Terlaksananya Layanan Pendaftaran nama domain an sub domain OPD Lingkup Pemda Kab. Solok	0	0 website	-	0 website	-	12 website	60,000,000	8 website	40,000,000	8 website	40,000,000	8 website	40,000,000	8 website	DINAS KOMINFO		
						Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Domain Portal dan website	Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Domain Portal dan website	0	0 seluruh OPD	-	1 seluruh OPD	180,000,000	1 seluruh OPD	180,000,000	0 seluruh OPD	-	1 seluruh OPD	50,000,000	0 seluruh OPD	-	0 seluruh OPD	DINAS KOMINFO		
						Layanan Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)	Terlaksananya Layanan Pengembangan dan Penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC)	0	0 Data Center	-	0 Data Center	-	1 Data Ceniter	131,000,000	1 Data Ceniter	439,500,000	1 Data Ceniter	612,000,000	1 Data Ceniter	340,000,000	1 Data Ceniter	DINAS KOMINFO		
						Layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah	Terlaksananya Layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah	0	0 Tahun paket tagihan	-	1 Tahun paket tagihan	85,000,000	1 Tahun paket tagihan	320,000,000	1 Tahun paket tagihan	1,389,069,150	1 Tahun paket tagihan	1,400,000,000	1 Tahun paket tagihan	1,400,000,000	1 Tahun paket tagihan	DINAS KOMINFO		
						Fasilitas Pengelolaan Domain /subdomain, portal dan website Lembaga Pemreintah di kab. Solok	Terkelolanya Domain /subdomain, portal dan website Lembaga Pemreintah di kab. Solok	0	0 instansi Pemerint ah	-	16 instansi Pemerintah	110,000,000	31 instansi Pemerintah	112,000,000	1 instansi Pemerintah	65,000,000	42 instansi Pemerintah	120,000,000	42 instansi Pemerintah	125,000,000	42 instansi Pemerintah	DINAS KOMINFO		
						Layanan Peningkatan Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika	Meeningkatnya Kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	240,000,000	100.00%	240,000,000	100.00%	240,000,000	100.00%	240,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO		
						Government Cloud Computing	Terselenggaranya Government Cloud Computing	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO		
						Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	Terlayanannya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah	0	0 tahun	-	0 tahun	-	1 tahun	413,900,000	1 tahun	415,000,000	1 tahun	415,000,000	1 tahun	420,000,000	1 tahun	DINAS KOMINFO		
						Layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik (Spot Wifi)	Terpetakannya blank spot, Jumlah spot wifi, jumlah koneksi internet (bandwith), dan intranet.	0	0.00%	-	100.00%	236,000,000	100.00%	3,016,000,000	100.00%	1,940,000,000	100.00%	1,954,400,000	100.00%	18,701,240,000	100.00%	DINAS KOMINFO		
						Layanan Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.	Tersedianya aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi.	0	0 SKPD	-	27 SKPD	255,000,000	27 SKPD	73,969,400	27 SKPD	40,000,000	27 SKPD	400,000,000	27 SKPD	500,000,000	27 SKPD	DINAS KOMINFO		
						Layanan interoperabilitas	Meningkatnya kemampuan kerjasama dalam melaksanakan beberapa jenis pekerjaan ASS	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	330,000,000	100.00%	330,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO		

2

					Layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan	Menyatunya sistem layanan publik dan pemerintahan OPD.	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	140,000,000	100.00%	140,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Pusat Application Programm Interface (API) Daerah	Tersedianya Application programme Interface (API) Daerah	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	300,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan monitoring trafik elektronik	Terlaksananya monitoring trafik elektronik	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah Kab. Solok	Terintegrasi pengelolaan TIK dan e-government Pemerintah Kab. Solok	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	90,000,000	100.00%	90,000,000	100.00%	90,000,000	100.00%	90,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan koordinasi kerjasama lintas OPD, lintas Pemda serta non pemerintah.	Tersedianya Forum Koordinasi Kerjasama lintas OPD, Lintas Pemerintoh Daerah serta Pemerintah	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Promosi pemanfaatan layanan smartcity	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Smart City	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
			1	25	22	Program Pengembangan Smart City	Persentase Pengembangan Smart City			-	-		700,000,000		980,000,000		930,000,000		930,000,000			
					Layanan Sistem Informasi Smart City	Tersedianya layanan Sistem Informasi Smartcity	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	100,000,000	100.00%	135,000,000	100.00%	330,000,000	100.00%	330,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat	Memadainya sarana dan Prasarana Layanan interaktif Pemerintah dan masyarakat	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Penyediaan sarana dan prasarana Pengendalian Smart City	Memadainya sarana dan prasarana Pengendalian Smart City	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	300,000,000	100.00%	545,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	300,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Pengembangan dan inovasi TIK dalam Implementasi e-Government	Terlaksananya Layanan Pengembangan dan inovasi TIK dalam Implementasi e-Government	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	210,000,000	100.00%	210,000,000	100.00%	210,000,000	100.00%	210,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan Publik	Terpeliharanya Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik OPD	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Pengembangan Business Process ReEngineering Pelayanan di Lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah (Stakeholders Smart City)	Tersedianya Layanan Pengembangan Business Process ReEngineering Pelayanan di Lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah (Stakeholders Smart City)	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
			1	25	21	Program Persandian dan Keamanan Informasi	Persentase Pelaksanaan Keamanan Informasi			-	-		1,220,000,000.00		866,000,000.00		520,000,000.00		520,000,000.00			

					Layanan Penanganan Insiden keamanan Informasi	Tertanganinya Insiden keamanan Informasi	-	0.00%	-	0.00%	-	100%	100,000,000.00	100%	96,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Persandian dan Keamanan Informasi pada Sistem elektronik	Terwujudnya Keamanan Informasi pada Sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Solok	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	100,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pelaksanaan Audit TIK	Terlaksananya Audit TIK	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Penyediaan sarana dan prasarana Telekomunikasi Pemerintah (Telphon, Iphon,Email,Videoconverence)	Tersedianya sarana dan prasarana Telekomunikasi Pemerintah (Telphon, Iphon,Email,Videoconverence)	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	900,000,000	100.00%	600,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	200,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pengadaan Penyimpanan, distribusi, Pengelolaan dan Pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian	Tersedia dan terkelolanya perangkat lunak dan perangkat keras persandian	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	150,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Pelaksanaan Operasional Komunikasi Sandi	Terlaksananya Operasional Komunikasi Sandi	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	50,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	0.00%	-	0.00%	DINAS KOMINFO	
					Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian	Terlaksananya Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
				1	25	20	Program Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik Sektoral	Persentase Pengelolaan Data Elektronik dan Statistik Sektoral		-	<u>50,000,000</u>		<u>335,000,000</u>		<u>335,000,000</u>		<u>360,000,000</u>		<u>360,000,000</u>			
					Penetapan Standar Format Data dan Informasi, walidata dan kebijakan	Adanya Penetapan Standar Format Data dan Informasi, walidata dan kebijakan	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	60,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Standarisasi Pertukaran Informasi untuk Database Informasi Lintas Setoral	Jumlah Pertukaran Informasi untuk Database Informasi Lintas Setoral	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
					Layanan Pengelolaan Data Elektronik Pemerintah dan Non Pemerintah	Terselenggaranya Portal Satu Data (lumbung data) Pemerintah Daerah Kab. Solok	0	0.00%	-	100.00%	50,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	

							Layanan Recovery Data dan Informasi	Terlayannya Recovery Data dan Informasi OPD Pemerintah Kab. Solok	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	50,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			-		406,213,000		647,965,000		463,910,000		653,176,600		1,547,828,320			
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0 lembar materai	-	280 lembar materai	2,500,000	280 lembar materai	2,500,000	280 lembar materai	1,500,000	280 lembar materai	2,500,000	280 lembar materai	3,500,000	280 lembar materai	DINAS KOMINFO	
							penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 lembar	-	75000 lembar	15,000,000	75000 lembar	16,500,000	75000 lembar	25,000,000	75000 lembar	27,500,000	75000 lembar	21,961,500	75000 lembar	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan bangunan kantor	0	0 paket	-	2 paket	6,000,000	2 paket	6,000,000	2 paket	5,000,000	2 paket	7,986,000	2 paket	8,784,600	2 paket	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman kantor	0	0.00%	-	100.00%	18,000,000	100.00%	19,800,000	100.00%	10,000,000	100.00%	23,958,000	100.00%	26,353,800	100.00%	DINAS KOMINFO	
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Luar daerah	0	0.00%	-	100.00%	160,000,000	100.00%	270,000,000	100.00%	150,000,000	100.00%	172,800,000	100.00%	138,240,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	0	0 paket	-	5 paket	25,000,000	5 paket	27,500,000	5 paket	30,250,000	5 paket	33,275,000	5 paket	36,602,500	5 paket	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan teknis perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Keamanan teknis perkantoran	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	60,000,000	100.00%	70,000,000	100.00%	70,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0.00%	-	100.00%	90,813,000	100.00%	160,765,000	100.00%	100,000,000	100.00%	231,501,600	100.00%	277,801,920	100.00%	DINAS KOMINFO	
							penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 bulan tagihan	-	12 bulan tagihan	33,600,000	12 bulan tagihan	33,600,000	12 bulan tagihan	16,860,000	12 bulan tagihan	40,656,000	12 bulan tagihan	44,721,600	12 bulan tagihan	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0 unit	-	3 unit	3,500,000	3 unit	4,500,000	3 unit	3,500,000	3 unit	6,000,000	3 unit	6,000,000	3 unit	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Gedung/Kantor	0	0%	-	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	DINAS KOMINFO	
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 paket	-	0 paket	50,000,000	4 paket	45,000,000	4 paket	50,000,000	4 paket	35,000,000	4 paket	35,000,000	4 paket	DINAS KOMINFO	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Memadainya sarana dan prasarana aparatur			-		266,870,000		839,215,000		249,170,000		426,616,000		433,431,200					
					Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan dan perlengkapan kantor	0	0.00%	-	100.00%	5,120,000	100.00%	9,870,000	100.00%	10,000,000	100.00%	9,870,000	100.00%	9,870,000	100.00%	DINAS KOMINFO			

				Rahabilitasi sedang berat gedung kantor	Terlaksananya Rahbilitasi sedang berat gedung kantor (frontliner dsb)	0	0 Tahun	-	0 Tahun	-	1 Tahun	9,870,000	1 Tahun	9,870,000	1 Tahun	9,870,000	1 Tahun	9,870,000	1 Tahun	DINAS KOMINFO	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya kendaraan roda 2 dan 4 penunjang kegiatan TIK	0	0.00%	-	100.00%	85,000,000	100.00%	500,000,000	100.00%	50,000,000	100.00%	50,000,000	0.00%	-	0.00%	DINAS KOMINFO	
				Pengadaan Meubeleur	Memadainya jumlah meubeleur aparatur	0	0.00%	-	100.00%	25,000,000	100.00%	57,800,000	100.00%	57,800,000	100.00%	57,800,000	100.00%	57,800,000	100.00%	DINAS KOMINFO	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	0	0 tahun	-	0 tahun	-	1 tahun	64,400,000	1 tahun	21,500,000	1 tahun	15,000,000	1 tahun	15,000,000	1 tahun	DINAS KOMINFO	
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas /operasional	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas /operasional	0	0.00%	-	100.00%	151,750,000	100.00%	197,275,000	100.00%	100,000,000	100.00%	284,076,000	100.00%	340,891,200	100.00%	DINAS KOMINFO	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03)	Meningkatnya Disiplin Aparatur			-		45,000,000		24,120,000		-		24,120,000		-			
				pengadaan kartu pengenalan pegawai	Terlaksananya pengadaan kartu pengenalan pegawai	0	0.00%	-	100.00%	1,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	DINAS KOMINFO	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	16,620,000	0.00%	-	100.00%	16,620,000	0.00%	-	0.00%	DINAS KOMINFO	
				pengadaan mesin/kartu absensi	Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi	0	0.00%	-	100.00%	45,000,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	DINAS KOMINFO	
				pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	0	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	7,500,000	0.00%	-	100.00%	7,500,000	0.00%	-	0.00%	DINAS KOMINFO	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya pengembangan sistem capaian kinerja			-		28,917,000		45,441,000		75,823,400		69,983,610		75,481,972			
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	0	0.00%	-	100.00%	6,885,000	100.00%	7,573,500	100.00%	27,000,000	100.00%	9,163,935	100.00%	10,080,329	100.00%	DINAS KOMINFO	
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	0	0.00%	-	100.00%	6,885,000	100.00%	7,573,500	100.00%	500,000	100.00%	9,163,935	100.00%	10,080,329	100.00%	DINAS KOMINFO	
				penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	0	0 paket laporan	-	1 paket laporan	6,885,000	1 paket laporan	7,573,500	1 paket laporan	8,330,850	1 paket laporan	9,163,935	1 paket laporan	10,080,329	1 paket laporan	DINAS KOMINFO	
				Pembuatan/Pengembangan website	Terlaksananya Pembuatan dan Pengembangan website	0	0 website	-	0 website	-	0 website	-	1 website	15,000,000	1 website	15,000,000	1 website	15,000,000	1 website	DINAS KOMINFO	
				penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun	0	0 paket laporan	-	1 paket laporan	688,500	1 paket laporan	7,573,500	1 paket laporan	8,330,850	1 paket laporan	9,163,935	1 paket laporan	10,080,329	1 paket laporan	DINAS KOMINFO	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanya Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0.00%	-	100.00%	688,500	100.00%	7,573,500	100.00%	8,330,850	100.00%	9,163,935	100.00%	10,080,329	100.00%	DINAS KOMINFO	

							Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pemerintah daerah	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Pemerintah daerah	0	0 paket laporan	-	1 paket laporan	6,885,000	1 paket laporan	7,573,500	1 paket laporan	8,330,850	1 paket laporan	9,163,935	1 paket laporan	10,080,329	1 paket laporan	DINAS KOMINFO	
							Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan capaian Kinerja	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	1,300,000	100.00%	1,300,000	100.00%	1,400,000	100.00%	1,400,000	100.00%	DINAS KOMINFO	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan target pada masing-masing Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan mempertimbangkan faktor kualitatif, kuantitatif, efisien dan efektifitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran prestasi suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan hal diatas untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang terdapat pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada ke 5 misi yang ada. dan 4 (empat) pilar pembangunan, yang dijabarkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD 2011-2021 sebagai berikut;

Sasaran:

1. Meningkatnya ketersediaan informasi publik
2. Meningkatnya pengaduan masyarakat berbasis online yang terfasilitasi
3. Meningkatnya Level SPBE

Strategi

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pengelola Informasi
3. Meningkatkan ketersediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) tentang informasi public
4. Meningkatkan Fasilitas Pemberdayaan StakeHolder Komunikasi Publik.
5. Meningkatkan Pengawasan Penyedia Layanan Informasi.
6. Meningkatkan Level Kebijakan SPBE
7. Meningkatkan Level Tata Kelola SPBE
8. Meningkatkan Level Layanan SPBE
9. Meningkatkan Saranan dan Prasarana Penunjang Data Statistik dan Elektronik
10. Meningkatkan Ketersediaan SDM Pengelola Data Statistik dan Elektronik
11. Meningkatkan ketersediaan NSPK Data Statistik dan Elektronik
12. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi
13. Meningkatkan Kapasitas SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi
14. Meningkatkan Ketersediaan NSPK Persandian dan Keamanan Informasi

Kebijakan

Dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 – 2021 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis yang telah ditetapkan lebih difokuskan kepada pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi :

1. Pengembangan Media dan Konten Komunikasi Informasi Publik
2. Pengembangan kapasitas SDM Pengelola Informasi
3. Penyusunan/Penyediaan Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPK) tentang informasi public
4. Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan StakeHolder Komunikasi Publik.
5. Peningkatan Pengawasan Penyedia Layanan Informasi.
6. Penyusunan/Penyediaan NSPK SPBE
7. Pengelolaan Infrastruktur SPBE
8. Pengembangan SDM Pengelola SPBE
9. Penyediaan dan Pengelolaan Aplikasi SPBE
10. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Data Statistik dan Elektronik
11. Pengembangan SDM Pengelola Data Statistik dan Elektronik
12. Penyusunan/Penyediaan NSPK Data Statistik dan Elektronik
13. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Persandian dan Keamanan Informasi
14. Pengembangan SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi
15. Penyusunan/Penyediaan NSPK Persandian dan Keamanan Informasi

Secara rinci, uraian Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan jangka menengah lima tahunan, yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dievaluasi melalui LAKIP Tahunan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan untuk dijadikan acuan pelaksanaan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang Komunikasi dan Informatika yang merupakan bagian awal dari kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari akuntabilitas dari penjabaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok dan diharapkan Renstra tahun 2016 – 2019 yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai pedoman bagi pimpinan dan stakeholder lainnya dalam penyusunan program dan kegiatan sertapenetapan kinerjatahun sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021 yang konsisten dan berkomitmen serta bertanggungjawab, Renstra ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui Informasi dan Teknologi.

Renstra ini diharapkan mampu memberikan informasi secara optimal atas berbagai tuntutan masyarakat maupun elemen lainnya terhadap kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang transparan dan mudah diakses.

Agar Tujuan dan Sasaran Diskominfo yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, maka seluruh Aparatur Diskominfo agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Aparat Diskominfo dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan perkembangannya dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara faktual dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta menghindari dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya.;
2. Menjalin komunikasi yang harmonis dengan SKPD lain maupun masyarakat dan stakeholder lainnya, sehingga terjadi sinergitas yang harmonis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang sehingga tidak terjadi pemikiran yang multi tafsir dari informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan ketersediaan data yang faktual.
4. Diharapkan seluruh Aparatur Dinas kominfo dapat berperan aktif memberikan informasi yang bertanggungjawab, bermartabat terhadap pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Solok akan mengambil langkah- langkah dalam mengimplementasikan Renstra ini sesuai visi, misi dan fungsi serta tugas pokoknya.

Demikian Renstra Diskominfo Kabupaten Solok ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021 dan RKPD pada setiap tahunnya.